

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH TAHUN 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 mengilustrasikan Indikator kinerja utama daerah, bertujuan memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian atau analisa pokok dan arah kebijakan RKPD. Indikator Kinerja Utama daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci selama periode satu tahun.

Pemerintah Kabupaten Sanggau menetapkan indikator makro pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indikator kinerja makro tersebut menjadi parameter keberhasilan pembangunan Kabupaten Sanggau, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan Provinsi dan nasional.

Indikator kinerja utama Pemerintah, memuat indikator kinerja sasaran strategis sebagai tolok ukur penilaian kinerja yang dicapai dengan dukungan pencapaian Indikator kinerja utama perangkat daerah. Perangkat daerah

secara tugas dan fungsi memiliki peran dominan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap misi pembangunan. Selanjutnya adalah indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci dijabarkan Indikator Kinerja Kunci tingkat hasil (*outcome*). Indikator Kinerja Kunci tingkat dampak (*impact*) memuat Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah maupun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Kunci tingkat dampak (*impact*) merupakan indikator kinerja sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah serta indikator kinerja sasaran strategis seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama perangkat daerah. Proyeksi indikator kinerja utama Tahun 2025 disajikan pada matrik 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Sanggau
Tahun 2025

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.81-5.02
2	Intensitas Emisi GRK (%)	25
3	Indeks Modal Manusia (IMM)/IPM	69.26
4	Tingkat Kemiskinan (%)	4.39
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.2-3.54
6	Rasio Gini	0.28
	PDRB per Kapita (Rp Juta)	56-58
	Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	9,6
Transformasi Sosial		
IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif		
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten ((%)	58
Transformasi Ekonomi		

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
IE4 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi		
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.2-3.54
	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	16.00-16.55
IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		
	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	
	Pembentukan Modal Tetap Bruto ((% PDRB)	
Transformasi Tata Kelola		
IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif		
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.42
	Indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3
Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah		
IE11 Stabilitas Ekonomi Makro		
	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)	0.20
	Tingkat Inflasi (%)	
IE15 Lingkungan Hidup		
	IKLH Daerah	75.14
	Timbulan Sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	5
IE 16 Berketahanan Energi, Air dan kemandirian Pangan		
	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	700
	Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	1.84
IE 17 Resiliensi terhadap Bencana dan perubahan Iklim		
	Indeks Risiko Bencana	125

Sumber: Hasil penyesuaian indikator utama, 2024

6.2. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sanggau merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disajikan pada tabel 6.2. berikut ini:

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau Tahun
2025

KODE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025 HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
02096	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	%	100	100
02098	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	100	100
02099	Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan	%	5	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
02207	Jumlah Produksi Jagung	Ton	20000	20000
03281	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	85	100
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
03299	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	11	20
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
03300	Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	97	100
03301	Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	80	100
03302	Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	40	100
03303	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura	%	100	100
03304	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan	%	80	100
03305	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan	%	100	100
03306	Jumlah Produksi Padi	Ton	69000	69000000
03307	Jumlah Produksi Kedelai	Ton	3.89	45000
03308	Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar)	Ton	15000	23000

KODE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025 HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
03309	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Ton	955	955
03310	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	Ton	5	5
03311	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	Ton	5	5
03312	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton	150	150
03313	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton	45	45
03314	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet	Ton	48000	48000
03315	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Lada	Ton	1200	1200
03316	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Pala	Ton	0	
03317	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Cengkeh	Ton	0	
03319	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Ton	4969	
03320	Jumlah Produksi Susu	Ton	0	
03321	Jumlah Produksi Telur	Ton	1300	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
088	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1010001	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persentase	70.00	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
101002	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	3	
101003	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	5.5	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1010034	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	%	100	100
1010036	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	85	100
1010037	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	%	100	100
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			

KODE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025 HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
101004	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persentase	3.5	10
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1010044	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	%	100	100
1010045	Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas	%	100	100
1010048	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	%	100	100
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
101005	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	2.90	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1010054	Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	%	50	50
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
101006	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah	1.267	1300
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1010060	Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	%	50	50
1010061	Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	%	10	
1010066	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	%	75	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
1011	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	3	
1012	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1020044	Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek pada balita)	%	13.5	14
1020045	Penemuan Kasus TBC	%	90	0.16

KODE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025 HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKP 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1020046	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	120	1.00
1020047	Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	%	100	100
1020048	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	75	1
1020051	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar.	%	100	100
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
1033	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	4.5	
1034	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	17.30	
1037	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	Orang	7500	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
105001	Jumlah Daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana	Provinsi	1	
105002	Jumlah Daerah yang meningkatkan upaya kesiapsiagaan dan melaksanakan pelayanan pemerintah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Provinsi	1	
105003	Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana	Daerah	100	100
105301	Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100
105302	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100
105304	Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, data agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/gladi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat provinsi	Dokumen	1	1
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
1082.1	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	%	100	12
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1084	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	81.47	81.47
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			

KODE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025 HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11001	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	75.14	67
11002	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	0.465	
11003	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	%	42	70
11004	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	43.62	25
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
111111	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Nilai	1.00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1126	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	74.05	100
1127	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100
1128	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.45	
1129	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya	Nilai	700	
1132	Persentase ARG	%	41.65	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
1174.1	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Orang	840000	15997
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
1181	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Index	65.30	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
11899	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	28	28
11900	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	5	
11902	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	15	
11903	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	35	
11904	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	86	
11905	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%	45	

KODE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025 HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11906	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0.1	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
1207	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	300	
1208	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai	00	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
1237	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	Index	47.83	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
1285	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp	0	50000000
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1300	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
1301	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
1302	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
1303	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
1304	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
1305	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase	100	100
1306	Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persentase	100	100
1307	Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persentase	100	100
1308	Jumlah PM yang Meningkatkan Pendapatannya	Orang	13	
1309	Persentase (%) KPM yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	100	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1999	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	64.6	
2000	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	31.1	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			

KODE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025 HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2024	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	%	67.10	
2025	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	70.00	
2026	Peningkatan Prestasi Olahraga	Indeks	25	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2121	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	95	100
2122	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100
2123	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100
2124	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraianannya dilaporkan	%	100	100
2125	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	%	62	40
2126	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	10	100
2127	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	Dokumen	2	2
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2131	Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif	Lembaga	1	100
2132	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	Desa	3	
2133	Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek	Desa	0	
2134	Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa	Desa	3	
2135	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes	Orang	163	
2136	Persentase Desa Mandiri	Persentase	57.65	58
2137	Persentase Kemiskinan di Perdesaan	Persentase	0	
2138	Persentase BUM Desa Maju	Persentase	4	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2401	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	53.38	

KODE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025 HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
25001	Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik"	daerah	15	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3261	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	170000	
3262	Rasio PDB Pariwisata	%	2.00	4.5
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
461.1	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	75000	
470	Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja	Orang	700	
470.1	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	88	
470.2	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	%	100	
484.2	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	70	
500.1	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD	%	60	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
5221	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2.6	1.86
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
5232	Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Orang	2	5
5233	Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi	Orang	2	5
5234	Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber dan Sandi	Orang	2	5
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
524	Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja	Laporan	2	
525	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia	Orang	7000	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			

KODE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025 HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
656	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2.18	2.18
657	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	59.8	
658	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	11	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
668	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	Perusahaan	1	20
7780	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	75	86
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
852	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Index	67.17	
858	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	63.35	35
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
CK01	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	%	3	65
CK02	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	54.09	54.09
CK12	Persentase angka BABS di tempat terbuka	%	14	40.94
CK2	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	26	53.13
CK4	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	%	55	55
Jakon3	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi	Orang	90	
Jakon4	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	Orang	90	
Jakon5	Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi	%	100	80
Jakon6	Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi	%	100	
Jakon7	Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	50	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
KP_04	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.785	1800
KP_05	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	12.622	14963
KP_06	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	39.50	46

KODE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025 HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KP_07	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	90	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
P1	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Bidang Tanah	3000	
P2	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	800	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
PR1	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Materi Teknis	1	
PR11	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	0	
PR12	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	Provinsi	0	
PR2	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Teknis	1	1
PR5	Penetapan RTRW	Perda/Perkada	0	
PR6	Penetapan RDTR	Perda/Perkada	1	
SDA10	Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	Km	0.656	
SDA7	Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi	Ha	141.08	
SDA8	Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi	Ha	19.80	
SDA9	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun	m ³ /detik	0	

Sumber: Hasil rakortek urusan 2024

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 merupakan *evidence* yang mutlak disajikan dalam *milestone* formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan konsistensi kebijakan publik menuju pelayanan publik prima, maka ditetapkan kaidah pelaksanaannya untuk memastikan rangkaian *public policy* yang dimulai dari *database*, formulasi, implementasi dan monitoring hingga evaluasi kebijakan pembangunan daerah dapat dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi yang menjadi target kinerja. Selain daripada itu memastikan target kinerja skala prioritas yang telah dijabarkan dan menjadi indikator kinerja utama dapat dicapai dengan filosofi *specific, measurable, achievable, relevant* dan *time-based*.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025, telah menguraikan target kinerja beserta pagu indikatif, sebagai referensi ketika evaluasi. Untuk itu mari kita semua masyarakat Kabupaten Sanggau dengan semangat berdompu, mari kita bergandengan tangan, bekerja dengan hati, mengoptimalkan seluruh potensi, sesuai tugas fungsi, mewujudkan Penguatan daya saing daerah, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum di Kabupaten Sanggau.

Pj. BUPATI SANGGAU,

SUHERMAN